



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

PARIWISATA SUMBANG PAD: *Pengunjung berfoto saat berwisata di Tebing Breksi, Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (8/11/2024). Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mencatat hingga akhir September 2024 pendapatan sektor pariwisata untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 283,53 miliar.*

KEMENKES KELUARKAN 2 SURAT EDARAN

Hujan, Waspada! DBD dan Leptospirosis

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan dua Surat Edaran (SE) Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), yakni tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Dengue (DBD) serta tentang Kewaspadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) Leptospirosis dalam menghadapi musim penghujan saat ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, situasi kasus dengue tahun 2024 sampai dengan minggu ke-30 sebanyak 202.012 kasus terkonfirmasi demam berdarah dengue (DBD) dengan Incident Rate (IR) sebesar 72,19 per 100.000 penduduk, dan 1.202 kematian dengan Case Fatality Rate 0,60 persen.

"Kasus dengue/DBD tersebut dilaporkan dari 481 kabupaten dan kota di 36 provinsi. Kematian DBD terjadi di 255 kabupaten dan kota

di 32 provinsi," kata Aji di Jakarta, Jumat (8/11).

Karena itu pihaknya mengimbau Pemerintah Daerah (pemda) dan publik untuk melakukan langkah-langkah antisipatif penyebaran DBD melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus, yakni menguras penampungan air seperti bak mandi, menutup tempat penampungan air seperti drum dan tempayan, mendaur ulang barang bekas, dan plus seperti memperbaiki saluran air dan lainnya.

Aji Muhawarman menyampaikan, publik perlu berperan serta dalam melaksanakan Gerakan Satu Rumah Satu Jumentik dengan menunjuk Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di setiap rumah. Untuk memutus rantai penularan dan meminimalisasi risiko kematian akibat keterlambatan penanganan, fasilitas kesehatan harus segera melaporkan kasus DBD dalam waktu tiga jam ke Dinas Kesehatan, yang kemudian akan melakukan penyelidikan epidemiologi dalam 24 jam.

Aji juga menyebutkan kasus leptospirosis cenderung meningkat setiap tahunnya. Di awal tahun, katanya, beberapa daerah sudah melaporkan peningkatan kasus leptospirosis seperti di Jawa Barat 8 kasus dengan 2 meninggal dan Jawa Tengah ada 19 kasus selama bulan Januari 2024.

Karena itu, katanya, Pemda diharapkan melakukan kesiapsiagaan KLB Leptospirosis dengan meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dengan melakukan surveilans pada manusia dan deteksi dini kasus di daerah yang mempunyai faktor risiko, seperti daerah banjir, area pertanian dan persawahan, peternakan, serta yang populasi tikusnya tinggi.

Ia juga menilai pentingnya melakukan langkah-langkah pencegahan, antara lain melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar aman dari jangkauan tikus, memakai alas kaki (sepatu boot) pada saat beraktivitas di tempat berair, tanah, lumpur atau genangan air yang kemungkinan tercemar kencing tikus.

(Ant/San)-d

KONSOLIDASIKAN PEMILU 2029

PPP Gelar Mukhtar Lebih Awal

JAKARTA (KR) - Mukhtar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan digelar lebih awal. Hal ini dimaksudkan agar memiliki waktu untuk mengkonsolidasikan persiapan menghadapi Pemilu 2029. "PPP menggelar mukhtar lebih awal dari jadwal agar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2029," kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat (8/11).

Disebutkan, mukhtar ke-10 PPP akan dimajukan dari rencana awal yang semula dijadwalkan dihelat pada Desember 2025. "Tetap tahun 2025, tapi tidak di akhir tahun," ucapnya.

Jadwal mukhtar PPP akan ditentukan saat pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar antara 10-15 Desember 2024. "Agenda utama Mukernas adalah menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan mukhtar X," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana keputusan yang disepakati saat Rapat Pengurus Harian DPP PPP ke-23 pada Kamis (7/11) malam. Rapat tersebut menyepakati pula penunjukkan Musyafa Nur sebagai Ketua Steering Committee (SC) Mukernas PPP, dan Amri M Ali sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Mukernas PPP.

Kemudian, Ermalena sebagai Ketua SC Mukhtar PPP, dan Arya Permana Graha sebagai Ketua OC Mukhtar PPP serta Achmad Baidowi sebagai Ketua Panitia Harlah Ke-52 PPP.

(Ant/Has)-d

Muhammadiyah-Malaysia Komit Dukong Palestina

YOGYA (KR) - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan Palestina di tengah tantangan politik internasional. Perjuangan kemerdekaan Palestina adalah harapan besar yang terus diperjuangkan Pemerintah Malaysia, termasuk melalui upaya diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal tersebut dikemukakan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin saat bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Jumat (8/11), di Kantor Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta. Selain membahas kerja sama pendidikan dan ekonomi, pertemuan keduanya juga membahas isu kemerdekaan Palestina.

Haedar dan Hasrin sepakat untuk meningkatkan konektivitas dengan dunia Islam demi memperku-

at dukungan terhadap Palestina di kancah internasional. Dukungan dari pemimpin politik seperti Anwar Ibrahim dan Prabowo Subianto dinilai dapat memperkuat solidaritas ini.

"Kita terus berjuang soal isu Palestina, meski banyak hambatan akibat politik antarbangsa. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memberikan bantuan kemanusiaan dan kesehatan. Saya juga senang karena waktu pelantikan Prabowo antara lain pesannya ialah kemerdekaan Palestina jadi misi utama kita semua," ungkap Hasrin.

Haedar Nashir menambahkan, gerakan pro-Palestina di kalangan masyarakat dunia terus tumbuh. Menurutnya, hal ini bisa mengubah dinamika politik di Timur Tengah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa solidaritas internasional harus tetap dijaga dengan menghindari gerakan ekstrem yang dapat merusak citra

perjuangan Palestina.

"Umat Islam harus tetap menjaga simpatik dunia internasional. Jika muncul gerakan 'keras', ini bisa merusak solidaritas global untuk Palestina. Nila setitik bisa merusak susu sebelang," tegas Haedar.

Dalam diskusi, Hasrin juga menyroto peran pemuda dan media internasional yang semakin mendukung perjuangan Palestina.

"Masyarakat dunia terutama generasi muda, kini lebih sadar akan isu Palestina. Kita bisa lihat ini di Spanyol. Media mainstream pun mulai membuka mata, sehingga Israel tak bisa lagi menipu," ucapnya.

Upaya boikot produk yang mendukung Israel disebutnya menjadi langkah strategis yang efektif. Konsumen di Indonesia dan Malaysia sangat besar. Dengan keberanian untuk memboikot produk tertentu, umat Islam bisa memberikan tekanan.

(Fsy)-d

TAK AKAN TARIK HASIL SELEKSI PANSEL

Presiden Setujui 10 Nama Capim KPK

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyo.

"DPR dipersilakan memroses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaran Yusril Ilha Mahendra di Jakarta, Jumat (8/11).

Yusril menegaskan Prabowo tidak akan menarik nama-nama hasil seleksi panitia yang telah disampaikan Jokowi ke DPR pada pemerintahan sebelumnya. Pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung bulan Desember 2024. Sementara per-

timbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan bahwa Presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

Menanggapi hal tersebut, Yusril menuturkan pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Jokowi, membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak. Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR tersebut dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan, sebagai jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dan putusan MK dipatuhi.

"Jalan tengah ini Insya Allah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir pada pengujung Desember yang akan datang," tutur Yusril.

Sebelumnya, sejumlah pihak sempat minta Presiden Prabowo mengulangi seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK karena menilai panel yang sah merupakan panel yang dibentuk Prabowo selaku Presiden saat ini. Salah satunya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

(Ant/Has)-f

BANDUNG (KR) - Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu menekankan kembali perlunya pers dan kinerja wartawan yang profesional dan berkualitas. Salah satunya melalui lembaga uji kompetensi.

Menjaga standar uji kompetensi wartawan, menurut Ninik Rahayu, memastikan semua lembaga uji memiliki standar minimal yang konsisten terkait uji kompetensi wartawan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman yang substansial maupun prosedural di antara lembaga-lembaga uji tersebut.

"Kita harus memastikan agar seluruh lembaga uji memiliki standar minimal, sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman yang berbeda-beda tentang uji kompetensi wartawan," ujar Ninik Rahayu saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Calon

Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Jumat (8/11) di Hotel Crowne Bandung.

Kegiatan yang digagas Dewan Pers ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengujian UKW diikuti 45 peserta dari sejumlah lembaga UKW, termasuk Lembaga UKW 'KR' Yogyakarta.

Menurut Ninik Rahayu, penting bagi wartawan dan perusahaan pers untuk tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Pada bagian lain, Ninik juga menyroto pentingnya menjaga independensi pers dan menghindari praktik-praktik yang merugikan kebermanfaatan informasi yang disampaikan kepada publik. "Kebebasan pers haruslah diiringi dengan tanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik," ujarnya.

Ia menambahkan, kompetensi wartawan ini menjadi jelas barometer apa yang dapat dipakai sebagai ukuran seseorang sudah layak menjalankan profesi wartawan atau belum.

Menjadi seorang jurnalis profesional, lanjutnya, bukan hanya sekadar menginformasikan berita. Namun sejak dalam proses mencari informasi, mengolah dan menyampaikannya, wartawan

harus memikirkan dampak berita yang dibuat.

Pada ToT yang berlangsung tiga hari ini menyajikan beberapa materi tentang pemahaman standar kompetensi wartawan, pendalaman soal UU No 40/1999 dan peraturan lain tentang pers. Selain itu, juga psikologi pengujian UKW, tata cara pengujian dan diakhiri dengan simulasi dan praktik pengembangan materi uji.

(Obi)-f



KR-Istimewa

Para peserta ToT calon penguji UKW.